*Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*
*Volume 9, Nomor 5, September-Oktober 2026*
*e-ISSN: 2598-4934*
*p-ISSN: 2621-119X*
*DOI: https://doi.org/10.31539/1f6szs41*

# PEMAKNAAN MAHASISWA TERHADAP KRITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH DI KANAL *YOUTUBE* FERRY IRWANDI

**Dardiri[1], Fitriyanto[2], Wahyu Jati Kusuma[3]**
Universitas Pancasakti Tegal[1,2,3]
ardisakwi86@gmail.com[1]

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mahasiswa memaknai dan menginterpretasikan konten kritik kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui kanal *Youtube* Ferry Irwandi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif dengan paradigma konstruktivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh mahasiswa dari berbagai program studi di Universitas Pancasakti Tegal yang rutin menonton konten *Youtube* Ferry Irwandi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka *encoding/decoding* Stuart Hall serta analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan berada pada posisi *negotiated reading*, yaitu menerima sebagian pesan kritik kebijakan yang disampaikan sekaligus tetap melakukan verifikasi dan penyesuaian berdasarkan latar belakang keilmuan dan pengalaman pribadi masing-masing; sebagian kecil informan cenderung pada *dominant reading* karena kesesuaian pesan dengan nilai tata kelola pemerintahan yang baik yang telah mereka pelajari; sementara posisi *oppositional reading* muncul secara terbatas, terutama terkait penggunaan judul dan *thumbnail* yang dinilai provokatif serta kecenderungan konten yang lebih menonjolkan kelemahan dibandingkan keberhasilan kebijakan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa mahasiswa sebagai audiens digital tidak bersifat pasif, melainkan aktif menegosiasikan makna berdasarkan literasi digital dan latar belakang disiplin ilmu masing-masing dalam memaknai konten kritik kebijakan pemerintah di media sosial.

**Kata Kunci:** Audiens Digital, Kritik Kebijakan Pemerintah, Kanal *Youtube* Ferry Irwandi, Pemaknaan Mahasiswa, Teori *Encoding*/*Decoding*.

## *ABSTRACT*

*This study aims to describe how university students interpret and make meaning of government policy criticism content presented through the Youtube channel of Ferry Irwandi. The study employed a descriptive-interpretive qualitative approach within a constructivist paradigm. Data were collected through in-depth interviews with ten students from various study programs at Universitas Pancasakti Tegal who regularly watch Ferry Irwandi's content, then analyzed using Stuart Hall's encoding/decoding framework along with thematic analysis. The findings show that most informants occupied a negotiated reading position, accepting part of the critical message while still verifying and adjusting it based on their disciplinary background and personal experience; a smaller number of informants leaned toward dominant reading due to the alignment of the message with good governance values they had studied; while oppositional reading appeared only in limited form, mainly concerning provocative titles and thumbnails and the tendency*

*of the content to emphasize policy weaknesses over successes. The study concludes that students as digital audiences are not passive but actively negotiate meaning based on their digital literacy and disciplinary background when interpreting government policy criticism content on social media.*

***Keywords:*** *Criticism of Government Policy, Digital Audience, Encoding/decoding Theory, Ferry Irwandi's Youtube Channel, Student Interpretation.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial dan proses pembentukan opini publik secara mendasar. Media sosial kini menjadi ruang utama distribusi informasi yang bersifat cepat, interaktif, dan masif, sehingga tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi tetapi juga cara individu memahami realitas sosial dan politik (Suhendra & Pratiwi, 2024). Data Digital 2023: Indonesia menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai lebih dari 167 juta orang, dengan dominasi pengguna berasal dari kelompok usia 18-34 tahun yang sebagian besar merupakan mahasiswa (Kemp, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang sangat aktif dalam mengonsumsi maupun memproduksi informasi digital, termasuk informasi mengenai kebijakan pemerintah.

Di antara berbagai platform digital, *Youtube* memiliki karakteristik audiovisual yang membuatnya tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi dan sikap audiens. Salah satu kreator konten yang cukup berpengaruh dalam mengkritisi kebijakan pemerintah adalah Ferry Irwandi, yang melalui kanal *Youtube*-nya secara konsisten mengangkat isu-isu tata kelola pemerintahan, seperti pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dugaan korupsi terstruktur di lingkungan PT Pertamina, serta perubahan aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten tersebut banyak ditonton dan didiskusikan oleh mahasiswa, namun sejauh mana dan dengan cara bagaimana mahasiswa memaknai pesan kritik tersebut belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya pada mahasiswa yang berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang beragam.

Fenomena ini penting dikaji karena mahasiswa, sebagai bagian dari generasi *digital native*, tidak dapat diasumsikan sebagai audiens yang homogen dan pasif terhadap pesan media. Stuart Hall dalam teorinya tentang *encoding/decoding* menjelaskan bahwa audiens dapat memaknai pesan media melalui tiga posisi, yaitu *dominant reading*, *negotiated reading*, dan *oppositional reading*, bergantung pada bagaimana pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang sosial masing-masing individu berinteraksi dengan pesan yang disampaikan (Hall, 1973). Dengan demikian, pemaknaan mahasiswa terhadap konten kritik kebijakan pemerintah tidak dapat dipahami secara seragam, melainkan perlu ditelusuri secara mendalam melalui pendekatan kualitatif yang menempatkan pengalaman informan sebagai sumber data utama.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran media sosial dalam pembentukan opini mahasiswa. Simanullang et al. (2025) menemukan bahwa media sosial berpengaruh signifikan terhadap pembentukan opini mahasiswa pada aspek kognitif, afektif, maupun konatif, namun penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah proses framing konten. S.L. Bariah dan Kusuma (2025) mengkaji framing dan hegemoni konten Pilkada NTB 2024 di Instagram dan menemukan bahwa mahasiswa mampu melakukan verifikasi dan reframing terhadap konten politik, namun berfokus pada konteks pemilihan kepala daerah di platform yang berbeda. Sementara itu, Puteri et al. (2025) mengkaji peran *content creator* sebagai agen bela negara dalam menangkal disinformasi dengan studi kasus konten Ferry Irwandi, tetapi belum menyasar secara khusus bagaimana proses pemaknaan audiens terjadi pada level individu mahasiswa dengan kerangka *encoding*/*decoding*. Penelitian-penelitian tersebut memberi landasan penting, namun belum ada yang secara spesifik menelusuri variasi pemaknaan mahasiswa lintas disiplin ilmu terhadap konten kritik kebijakan pemerintah pada kanal *Youtube* Ferry Irwandi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal memaknai dan menginterpretasikan konten kritik kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui kanal *Youtube* Ferry Irwandi, dengan menelusuri posisi pembacaan audiens berdasarkan kerangka *encoding/decoding* Stuart Hall. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penerapan kerangka *encoding/decoding* secara eksplisit untuk memetakan variasi pemaknaan mahasiswa lintas program studi (Ilmu Hukum, Informatika, Manajemen, Pendidikan Bahasa Indonesia, Akuntansi, Teknik Sipil, dan Ilmu Pemerintahan) terhadap satu kreator konten kritik kebijakan yang sama, sehingga dapat menunjukkan bagaimana latar belakang keilmuan memengaruhi posisi pembacaan audiens terhadap isu yang identik. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa penguatan kajian resepsi audiens dalam komunikasi politik digital, serta manfaat praktis bagi kreator konten, pendidik, dan masyarakat dalam memahami bagaimana generasi muda memaknai kritik kebijakan pemerintah di media sosial secara lebih kritis dan tidak seragam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif dengan paradigma konstruktivis untuk memahami proses pemaknaan mahasiswa secara mendalam dan kontekstual; prosedur penelitian dimulai dari tahap persiapan berupa penentuan objek konten dan penyusunan pedoman wawancara, dilanjutkan tahap pelaksanaan berupa wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sepuluh mahasiswa aktif Universitas Pancasakti Tegal dari tujuh program studi berbeda yang rutin menonton konten *Youtube* Ferry Irwandi terkait isu Danantara, korupsi Pertamina, dan aturan PPN, serta tahap penyelesaian berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan; penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2026 di lingkungan

Universitas Pancasakti Tegal, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah; data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara terstruktur, observasi non-partisipan terhadap pola interaksi mahasiswa dengan konten, dan dokumentasi berupa potongan video serta transkrip wawancara; data kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis tematik model Miles, Huberman, dan Saldana (reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan) yang dipadukan dengan kerangka *encoding/decoding* Stuart Hall untuk mengategorikan posisi pemaknaan setiap informan ke dalam *dominant reading*, *negotiated reading*, atau *oppositional reading*, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber antarinforman lintas program studi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Informan dan Representasi Isu

Penelitian ini melibatkan sepuluh informan mahasiswa aktif Universitas Pancasakti Tegal dari program studi Ilmu Hukum (I-01, I-04), Informatika (I-02), Manajemen (I-03, I-09), Pendidikan Bahasa Indonesia (I-05, I-07), Akuntansi (I-06), Teknik Sipil (I-08), dan Ilmu Pemerintahan (I-10). Seluruh informan menyatakan bahwa Ferry Irwandi secara konsisten mengangkat isu-isu tata kelola pemerintahan yang sedang menjadi perhatian publik, seperti pengelolaan Danantara, dugaan korupsi terstruktur di Pertamina, dan perubahan aturan PPN. Pola penyajian yang dilaporkan hampir seragam di seluruh informan, yaitu diawali penjelasan latar belakang kebijakan, dilanjutkan pemaparan data dan regulasi, kemudian ditutup dengan analisis dan kritik. Pola ini sejalan dengan struktur framing Entman yang meliputi *problem definition*, *causal interpretation*, *moral evaluation*, dan *treatment recommendation* (Entman, 1993), di mana informan secara konsisten melaporkan bahwa Ferry Irwandi terlebih dahulu mendefinisikan masalah kebijakan sebelum menyampaikan interpretasi penyebab dan rekomendasi penyelesaian, seperti mendorong peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

### *Dominant Reading*: Penerimaan Pesan Kritik Kebijakan

Sebagian informan menunjukkan kecenderungan *dominant reading*, yaitu menerima pesan utama kreator secara relatif utuh karena kesesuaiannya dengan nilai atau pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. I-01 dan I-03, yang masing-masing berlatar belakang Ilmu Hukum dan Manajemen, menyatakan bahwa pesan mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dirasakan sejalan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mereka pelajari di bangku kuliah, sehingga pesan tersebut relatif mudah diterima. I-10, yang menempuh Ilmu Pemerintahan, turut menerima pesan utama karena melihat kesesuaiannya dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Meskipun demikian, penerimaan pesan pada kelompok ini tidak bersifat mutlak; ketiganya tetap menyatakan kebiasaan mencari sumber pembanding sebelum sepenuhnya memercayai suatu simpulan, sehingga penerimaan yang

terjadi lebih tepat disebut penerimaan yang disertai kewaspadaan (qualified acceptance) daripada penerimaan tanpa syarat.

Temuan ini memperkuat argumen Hall (1973) bahwa *dominant reading* terjadi ketika kode yang disampaikan produsen pesan selaras dengan kerangka rujukan (frame of reference) audiens. Dalam konteks penelitian ini, kesesuaian antara pesan Ferry Irwandi dengan materi perkuliahan tentang demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi warga negara menjadi faktor penentu mengapa sebagian informan cenderung menerima pesan tersebut secara relatif utuh

### *Negotiated Reading*: Penerimaan Sebagian dan Negosiasi Makna

Mayoritas informan dalam penelitian ini berada pada posisi *negotiated reading*, yaitu menerima sebagian pesan namun tetap melakukan penyesuaian, negosiasi, atau verifikasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi. I-02 (Informatika) dan I-06 (Akuntansi) menyatakan setuju terhadap data dan analisis yang disampaikan, tetapi tetap mempertanyakan kelengkapan faktor penyebab yang dijelaskan, seperti kondisi ekonomi global atau kendala birokrasi yang menurut mereka belum dibahas secara mendalam. I-04 dan I-08, yang masing-masing berlatar belakang Ilmu Hukum dan Teknik Sipil, menegosiasikan pesan dengan menghubungkannya pada kerangka regulasi dan kewenangan lembaga, serta menilai bahwa suatu kebijakan perlu dilihat dari hasil akhir pelaksanaannya sebelum dapat disimpulkan bermasalah. I-09, yang menghubungkan isi konten dengan pengalaman keluarganya di sektor pertanian, menunjukkan bahwa negosiasi makna tidak hanya terjadi berdasarkan latar belakang akademik, tetapi juga pengalaman personal informan di luar bangku kuliah.

Pola negosiasi yang paling menonjol adalah kebiasaan informan membandingkan isi video dengan sumber lain, seperti berita nasional, dokumen resmi pemerintah, undang-undang, maupun diskusi dengan sesama mahasiswa, sebelum membentuk pendapat akhir. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam proses *decoding*; sebagaimana dikemukakan Khairina (2026), mahasiswa dengan literasi digital yang baik cenderung mampu melakukan verifikasi informasi dan membangun interpretasi yang lebih kritis, alih-alih menerima framing kreator konten secara mentah. Latar belakang disiplin ilmu tampak memengaruhi aspek apa yang paling dinegosiasikan oleh masing-masing informan; mahasiswa Hukum lebih menyoroti kelengkapan dasar hukum dan prosedur pembentukan kebijakan, mahasiswa Manajemen dan Akuntansi lebih menyoroti aspek efektivitas dan pengelolaan anggaran, sementara mahasiswa Informatika dan Teknik Sipil lebih menekankan pentingnya bukti data dan visualisasi sebelum menerima suatu simpulan

### *Oppositional Reading*: Penolakan Sebagian terhadap Framing Konten

Posisi *oppositional reading* muncul secara terbatas dan umumnya tidak berupa penolakan menyeluruh terhadap pesan, melainkan penolakan terhadap elemen tertentu dari cara penyajian konten. Beberapa informan, termasuk I-03, I-05, dan I-07, menyoroti penggunaan judul dan

thumbnail video yang dinilai dibuat provokatif sehingga berpotensi membentuk persepsi awal penonton sebelum mereka benar-benar memahami isi video secara utuh. Informan lain, seperti I-06, I-08, dan I-09, menolak kecenderungan konten yang dinilai lebih banyak menonjolkan kelemahan kebijakan dibandingkan keberhasilannya, sehingga menurut mereka penonton berisiko memperoleh gambaran yang kurang berimbang apabila tidak mencari sumber pembanding. I-04, dari Ilmu Hukum, menolak bagian analisis yang dinilai terlalu menyederhanakan aspek kewenangan antar lembaga negara, karena menurutnya persoalan hukum memerlukan kajian yang lebih kompleks daripada yang dapat disampaikan dalam satu video *Youtube* berdurasi terbatas.

Temuan ini menunjukkan bahwa penolakan yang terjadi bersifat parsial dan berbasis argumentasi, bukan penolakan ideologis terhadap pesan kritik kebijakan itu sendiri. Hal ini konsisten dengan temuan S.L. Bariah dan Kusuma (2025) yang menunjukkan bahwa mahasiswa mampu melakukan reframing terhadap konten politik alih-alih menerima atau menolaknya secara mutlak. Tidak satu pun informan dalam penelitian ini menempatkan diri pada posisi *oppositional reading* secara penuh terhadap keseluruhan pesan Ferry Irwandi, yang mengindikasikan bahwa kredibilitas konten, yang didukung penggunaan data, kutipan regulasi, dan referensi resmi, tetap dipandang informan sebagai faktor yang membatasi ruang penolakan sepenuhnya.

**Peran Konten terhadap Pembentukan Sikap dan Tindakan Mahasiswa**

Pada aspek kognitif, seluruh informan melaporkan peningkatan pengetahuan mengenai proses penyusunan kebijakan, mekanisme pengelolaan lembaga negara, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat setelah menonton konten Ferry Irwandi. Pada aspek afektif, informan melaporkan perasaan campur aduk antara keprihatinan terhadap kasus yang dikritik dan motivasi untuk memahami persoalan secara lebih mendalam, namun tidak satu pun informan melaporkan perasaan antipati menyeluruh terhadap pemerintah. Pada aspek konatif, mayoritas informan melaporkan peningkatan intensitas diskusi dengan teman sebaya, keterlibatan dalam forum atau seminar kampus, serta kebiasaan verifikasi informasi sebelum membagikannya di media sosial. Perubahan opini yang dilaporkan informan umumnya bersifat bertahap, yaitu bergeser dari penilaian kebijakan berdasarkan hasil akhir menuju penilaian yang turut memperhatikan proses penyusunan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa mahasiswa sebagai audiens digital bukanlah kelompok yang pasif dalam menerima pesan media, melainkan aktif memaknai dan menegosiasikan pesan berdasarkan latar belakang disiplin ilmu, literasi digital, dan pengalaman pribadi masing-masing, sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka *encoding/decoding* Stuart Hall. Variasi posisi pembacaan antarinforman lintas program studi memperlihatkan bahwa satu konten

kritik kebijakan yang sama dapat dimaknai secara berbeda-beda, bergantung pada kerangka rujukan pengetahuan yang dimiliki masing-masing audiens.

**Variasi Pemaknaan Berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu**

Temuan lintas informan menunjukkan pola yang menarik ketika dilihat dari sudut pandang disiplin ilmu masing-masing. Informan dari Ilmu Hukum (I-01, I-04) secara konsisten menyoroti kelengkapan dasar hukum, prosedur pembentukan kebijakan, dan kewenangan antar lembaga negara, sehingga mereka cenderung menilai bahwa konten Youtube belum sepenuhnya memadai sebagai rujukan akademik meskipun tetap dianggap bermanfaat sebagai pengantar pemahaman awal. Informan dari Informatika dan Teknik Sipil (I-02, I-08) lebih menitikberatkan pada aspek verifikasi data, keakuratan visualisasi, dan konsistensi angka yang ditampilkan, mencerminkan kebiasaan berpikir sistematis yang mereka peroleh dari bidang studinya. Sementara itu, informan dari Manajemen dan Akuntansi (I-03, I-06, I-09) lebih banyak mengaitkan isi konten dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sedangkan informan dari Pendidikan Bahasa Indonesia (I-05, I-07) lebih memperhatikan aspek penyampaian pesan, pilihan kata, dan strategi komunikasi yang digunakan Ferry Irwandi dalam menyederhanakan isu yang kompleks. Informan dari Ilmu Pemerintahan (I-10) menunjukkan kecenderungan paling dekat dengan *dominant reading* karena kesesuaian pesan dengan prinsip demokrasi dan partisipasi warga negara yang menjadi inti bidang studinya.

Variasi tersebut memperlihatkan bahwa proses *decoding* tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan selalu ditengahi oleh kerangka rujukan pengetahuan (frame of reference) yang dibawa audiens ke dalam proses pemaknaan, sebagaimana ditegaskan Hall (1973) bahwa kode yang sama dapat menghasilkan pembacaan yang berbeda tergantung posisi sosial dan pengetahuan audiens. Dalam konteks penelitian ini, disiplin ilmu berfungsi sebagai salah satu unsur penting dari kerangka rujukan tersebut, di samping literasi digital dan pengalaman pribadi informan.

**Peran Literasi Digital dalam Proses Verifikasi**

Seluruh informan, tanpa terkecuali, melaporkan kebiasaan melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan dalam konten Ferry Irwandi, meskipun dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda. Sebagian informan (I-02, I-04, I-08, I-10) menyebutkan kebiasaan membuka peraturan perundang-undangan, laporan resmi lembaga, atau dokumen pemerintah secara langsung, sementara informan lain (I-01, I-03, I-05, I-06, I-07, I-09) lebih banyak mengandalkan perbandingan dengan pemberitaan media massa nasional seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia. Kebiasaan verifikasi ini konsisten dengan temuan Nisa (2024) bahwa literasi digital berperan penting dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial, karena kemampuan memilah sumber, memeriksa tanggal publikasi, dan mengenali potensi bias algoritmik membuat audiens tidak mudah

menerima framing kreator konten secara mentah. Pada penelitian ini, informan yang memiliki kebiasaan verifikasi paling intensif justru cenderung berada pada posisi *negotiated reading*, sedangkan informan yang verifikasinya lebih terbatas sedikit lebih dekat pada *dominant reading*, meskipun perbedaan tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap dipengaruhi oleh kesesuaian pesan dengan pengetahuan awal masing-masing individu.

Temuan ini turut memperkaya kajian Idmayanti dan R (2025) mengenai dinamika resepsi audiens dalam mengonsumsi konten informatif di media digital, yang menunjukkan bahwa audiens masa kini cenderung aktif memverifikasi silang berbagai sumber sebelum membentuk sikap akhir terhadap suatu isu. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberadaan literasi digital yang memadai menjadi prasyarat penting agar proses *decoding* pesan kritik kebijakan pemerintah berlangsung secara kritis, bukan sekadar reproduksi pasif dari framing yang dibangun kreator konten.

**Implikasi terhadap Pembentukan Opini Sosial Mahasiswa**

Variasi posisi pembacaan yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap pemahaman mengenai pembentukan opini sosial mahasiswa di era digital. Opini sosial, sebagaimana dijelaskan Aswan (2025), terbentuk melalui interaksi antara paparan media, pengalaman individu, dan dinamika diskursus sosial. Dalam penelitian ini, opini yang terbentuk pada diri mahasiswa bukan merupakan hasil transfer pesan secara langsung dari kreator konten kepada audiens, melainkan hasil negosiasi aktif antara pesan yang disampaikan Ferry Irwandi dengan pengetahuan disiplin ilmu, pengalaman personal, dan kebiasaan verifikasi masing-masing informan. Fenomena ini berbeda dengan model komunikasi satu arah yang mengasumsikan audiens sebagai penerima pasif, dan lebih mendekati model resepsi aktif yang menekankan peran audiens sebagai produsen makna.

Implikasi lain yang dapat ditarik adalah pentingnya peran perguruan tinggi dalam menguatkan kemampuan literasi digital dan berpikir kritis mahasiswa, mengingat konten kritik kebijakan pemerintah di media sosial akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. Penguatan kemampuan tersebut penting agar mahasiswa, sebagai kelompok *digital native* yang aktif mengonsumsi maupun memproduksi informasi politik, mampu memaknai konten kritik kebijakan secara proporsional, tidak mudah terjebak pada framing sepihak, namun juga tidak menolak kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, temuan penelitian ini relevan tidak hanya bagi kajian komunikasi digital, tetapi juga bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya partisipasi kritis mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal memaknai konten kritik kebijakan pemerintah pada kanal *Youtube* Ferry Irwandi secara aktif dan bervariasi, dengan

mayoritas informan berada pada posisi *negotiated reading*, sebagian kecil pada *dominant reading*, dan penolakan yang bersifat parsial pada elemen tertentu konten (oppositional reading). Latar belakang disiplin ilmu dan tingkat literasi digital informan terbukti memengaruhi aspek yang dinegosiasikan maupun diterima dari pesan kritik kebijakan yang disampaikan. Konten tersebut turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai tata kelola pemerintahan serta mendorong perubahan cara pandang dari penilaian berbasis hasil akhir menuju penilaian yang memperhatikan proses, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan lintas perguruan tinggi serta menelaah pengaruh algoritma platform terhadap pola konsumsi konten kritik kebijakan pemerintah di kalangan mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA


Aisyah, S. N., Kamalia, S. D. N., Bawana, D. I. G., Jannah, Z. F., & Yuanita, A. (2025). Membaca kritis: Bagaimana mengidentifikasi informasi yang akurat. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 3*(2), 187-198. https://doi.org/10.58540/pijar.v3i2.795

Aswan. (2025). Selera politik masyarakat Indonesia, 2, 306-312.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication, 43*(4), 51-58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Fatimah, S. (2025). Transformasi ruang publik digital: Tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. Jurnal Litbang Kebijakan, 19(1), 67-86.

Hall, S. (1973). *Encoding* and *decoding* in the television discourse. Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham. https://epapers.bham.ac.uk/2962/

Idmayanti, N., & R, M. (2025). Dinamika resepsi audiens dalam mengonsumsi konten informatif akun X @KA1121. *Jurnal Reputasi, 21*(2), 78-83.

Kemp, S. (2023). Digital 2023: Indonesia. https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia

Khairina. (2026). Partisipasi mahasiswa Kota Jambi sebagai agen perubahan dalam politik pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, 1-28.

Khairunnisa, A. (2025). Dampak komunikasi politik melalui media sosial terhadap paradigma masyarakat. *Publistik: Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media, 2*(2), 1-6.

Nisa, K. (2024). Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial. *Impressive: Journal of Education, 2*(1), 1-11. https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75

Puteri, F., Balqis, M., Setiawan, D., Safira, M., Nadia, I., & Falih, S. (2025). Peran *content creator* sebagai agen bela negara dalam menangkal disinformasi: Studi kasus konten Ferry Irwandi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu, 2*(3), 29-35. https://doi.org/10.69714/6eec1s75

S.L. Bariah, N., & Kusuma, K. S. (2025). Media sosial dan opini politik mahasiswa (Analisis framing dan hegemoni konten Pilkada NTB 2024 di Instagram). Edu Research: Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS), 1-18.

Simanullang, S. C., Nababan, I. O., Bangun, D. P. B., & Silaban, F. H. (2025). Peran media sosial dalam membentuk opini mahasiswa Universitas Negeri Medan tentang isu politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*, 214-224.

Suhendra, & Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. IAPA Proceedings Conference, 293. https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059

Wodak, R. (2019). *Critical discourse studies: History, agenda, theory, and methodology*. Sage Publications.